



Pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Army Adelia M B, Christina Dwi Astuti

Universitas Trisakti

Abstract This research aims to obtain empirical evidence of the influence of SAKTI, SDMA Competency, and SPIP on the Quality of Government Financial Reports. The research was carried out using quantitative methods where the population was Commitment Making Officer (PPK) staff at the Secretariat General (Setjen) of the DPR RI. The PPK staff at the Secretariat General of the DPR RI totals 31 people. This research was carried out by distributing questionnaires via Google Form. The data analysis method uses multiple linear regression. The research results show that the SAKTI, SDMA Competency, and SPIP have a positive effect on the Quality of Government Financial Reports.

Keywords: SAKTI, SDMA Competency, SPIP, and Quality of Government Financial Reports

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh SAKTI, Kompetensi SDMA, dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dimana populasinya adalah Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Staf PPK di Setjen DPR RI berjumlah 31 orang. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner melalui Google Form. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel SAKTI, Kompetensi SDMA dan SPIP berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Kata Kunci: SAKTI, Kompetensi SDMA, SPIP, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban oleh pemerintahan suatu negara pada pengelolaan keuangannya yaitu dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Dimana penyusunannya berdasarkan standar pemerintah sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pengambilan dan penentuan keputusan yang terjamin dan tepat memberi manfaat berupa peningkatan kepercayaan masyarakat atas kinerja dari pengelolaan dana negara dalam aktivitas bernegara oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus menjamin bahwa penyusunan dan penyajiannya harus sesuai dengan peraturan tersebut ialah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

SAKTI berbasis web dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan dengan device apapun dengan syarat terkoneksi internet. Hal ini memudahkan pegawai dalam bekerja secara Work From Home (WFH) saat Pandemi Cov-19. Adapun yang perlu diperhatikan adalah login SAKTI hanya dapat dilakukan pada satu sesi dan user tidak dapat digunakan secara bersamaan, hal ini untuk mengurangi terjadinya overlapping data. Adanya One Time Password (OTP) untuk user juga merupakan bentuk validasi berlapis dari pejabat berwenang (Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, 2022).

Received Desember 16, 2023; Accepted Januari 26 2024; Published April 20 2024

* Army Adelia M B,

PP Nomor 60 Tahun 2008 terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjelaskan dimana pengawasan tersistematis diselenggarakan pada lingkungan pemerintah baik di pusat serta daerah secara terus menerus dan menyeluruh baik pada level pimpinan hingga pegawai dengan bertujuan memberikan kepercayaan atas ketercapaian tujuan organisasi yang efektif serta efisien secara terus menerus. Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nasional (BPKP) melaksanakan pemantauan keuangan negara/daerah khususnya melakukan penilaian melalui survey maturitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory

Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dikenalkan Davis. *et al.*, (1989) dimana si pengguna/ user menerima sistem teknologi informasi, hal ini sejalan dengan keinginan kelompok tersebut sehingga menjadi manfaat dalam pemerapan sistem baru, namun apabila si pengguna menolaknya, justru dapat menimbulkan permasalahan baru. Oleh karena itu, sikap individu/ pengguna sangat mempengaruhi dalam teori TAM ini. TAM bertujuan untuk menjelaskan perilaku yang dilakukan individu dalam memiliki kemauan atau niat atas kemauan sendiri, hal ini berhubungan dengan sebab akibat dari manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan dalam penggunaan Teknologi Informasi. Persepsi seorang pengguna akan mempengaruhi penggunaannya. TAM memiliki lima konstruk persepsi, yaitu:

1. Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*);
2. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*);
3. Sikap dalam menggunakan (*attitude toward using*);
4. Perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*); dan
5. Kondisi nyata penggunaan sistem (*actual system usage*)

Teori Resource Based View (RBV)

Teori *Resource Based View* (RBV) diperkenalkan Wernfelt (1984), dimana keberhasilan ditentukan oleh kapabilitas sumber daya yang dimiliki sehingga perlu adanya peningkatan sumber daya strategis organisasi yang bersaing dan unggul. Suatu organisasi yang mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik sehingga mencapai keunggulan kompetitif maka akan mencapai keberhasilan, dengan memanfaatkan apa yang dimilikinya mampu menjadikan kelebihan dibandingkan yang lain. Kinerja organisasi yang baik akan membantu organisasi tersebut mencapai tujuannya.

Agency theory

Agency theory menjadi *grand theory* dalam penelitian ini, Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan agency theory merupakan hubungan keagenan yaitu adanya kesepakatan dimana seorang (principal) memberikan perintah kepada orang lain (agent) untuk melaksanakan layanan jasa yang didelegasikan oleh prinsipal serta kewenangan tersebut diberikan ke agen untuk membuat keputusan terbaik yang diharapkan principal. Dalam melakukan pelayanan tertentu oleh agen untuk kepentingan principal, perlu pelibatan dari pendelegasian beberapa kewenangan dalam menentukan keputusan. Dari sudut pandang agency theory dapat menimbulkan dua permasalahan diantaranya yaitu permasalahan agency yang muncul ketika terjadi konflik diantara agent dan principal yang berkaitan dengan tujuan perusahaan dimana seorang principal kesulitan memverifikasi kegiatan agent, permasalahan kedua yaitu pembagian resiko yang mana muncul ketika principal dan agen memiliki perbedaan cara sudut pandang terhadap resiko itu sendiri. Konflik-konflik dimaksud menimbulkan asimetris informasi dimana ketidakseimbangan perolehan informasi antara agen yang mengelola manajemen perusahaan dengan principal sebagai pemegang saham yang memberi kepercayaan. R.A Supriyono (2018:63) juga menyatakan tentang hubungan kontraktual dimana principal merupakan pihak yang memberikan mandat atau perintah kepada agent untuk bertindak atas nama principal, sedangkan agent merupakan pihak yang diberi amanat oleh principal untuk menjalankan perusahaan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang diperbarui menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana penyusunan laporan keuangan pemerintah yaitu penyediaan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode laporan. Penggunaan laporan keuangan untuk menilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam kegiatan-kegiatan operasional pemerintah, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Komponen pokok Laporan Keuangan Pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Serangkaian sistematis dalam melaksanakan fungsi akuntansi dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dalam organisasi pemerintah merupakan definisi dari Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Pemerintah memaksimalkan tata kelola pengelolaan negara

dalam keuangannya yang tertib, efisien, efektif, transparan serta bertanggungjawab dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain, oleh karenanya perlu sistem informasi yang terintegrasi melalui SAKTI. PMK No. 159/PMK.05/2018 telah mengatur mengenai Pelaksanaan Piloting SAKTI, namun hal ini diperbarui menjadi PMK No 203/PMK.05/2018 tentang Perubahan Pelaksanaan Piloting SAKTI, dan yang terakhir PMK No 171/PMK.05/2021.

Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)

Kompetensi Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pengguna SAKTI dijelaskan standarnya pada Tabel 1.

Tabel 1
Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengguna SAKTI

NO	UNIT KOMPETENSI
1	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan RPD
2	Menyusun kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa
3	Menyusun spesifikasi teknis
4	Menyusun harga perkiraan
5	Menyusun rancangan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa
6	Melakukan persiapan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola
7	Melakukan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola
8	Menyampaikan perjanjian/kontrak yang dilakukan kepada Kuasa BUN
9	Menguji dokumen bukti mengenai hak tagih kepada negara
10	Menerbitkan SPP
11	Mengendalikan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Panduan Penilaian Unit Kompetensi menurut peraturan mencakup:

- 1) Pengetahuan (*knowledge*)
 - a) Pemahaman Peraturan perundang-undangan yang berkaitan unit kompetensi
 - b) Pemahaman Aplikasi SAS/ SAKTI/ *E-catalog*/ PPSPM
 - c) Pemahaman *Standar Operating Procedure* (SOP) yang berkaitan termasuk menatausahakan dokumen/ pengarsipan yang berkaitan unit kompetensi.
- 2) Keterampilan (*skill*)

Komunikasi serta koordinasi informasi antar pemangku kepentingan baik di internal sekaligus eksternal diharapkan mampu memahami dan melaksanakan prosedur yang berkaitan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Sikap kerja (*attitude*)

Sikap kerja berupa disiplin, teliti, jujur, dan cermat.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam SK Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1268/SEKJEN/2015 yang diperkuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dimana proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan Sistem Pengendalian Internal (SPIP). Sedangkan SPIP, diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga diharapkan tidak hanya efektif, efisien namun lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya, hal ini sesuai ketentuan. Para pemangku pemerintahan diwajibkan melakukan pengendalian terhadap pengelolaan kegiatan dengan berpedoman pada SPIP. Hal ini diharapkan mampu memberikan kepercayaan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan pengoperasian pemerintah, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian yang akan dibuat bertujuan agar mendapatkan bukti empiris dari besaran pengaruh SAKTI, Kompetensi SDMA, dan SPIP sebagai variabel independen terhadap variabel dependennya ialah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Sampel penelitian yang akan dilakukan merupakan pegawai yang menggunakan SAKTI yaitu Staf Pejabat Pembuat Komitmen.

Penggunaan kuesioner/ angket dalam penelitian ini memanfaatkan penggunaan teknologi yaitu Link *Google Form* yang disebarakan kepada responden. Alasan peneliti memanfaatkan link ini untuk mempermudah dan mempercepat pengumpulan data dan informasi responden. Pengumpulan data selama 1 bulan pada bulan Juni 2023. Adapun data tersebut telah direkap dalam bentuk *spreadsheet* dan *excel*. Semua data diuji secara statistik untuk melihat kelayakannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Hasil Uji Validitas

Dengan signifikansi 5%, jumlah data (n) = 31, $df = 31-2 = 29$, diperoleh r tabel = 0.3550, pengujian validitas setiap item pernyataan menggunakan bantuan program SPSS 26. Hasil uji validitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel 2. berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Sig.	Keterangan
SAKTI	Pemahaman PMK Nomor 171/PMK.05/2021	0.05	Valid
	Efektivitas Single Entry Point (SEP)	0.05	Valid
	Verifikasi dan Validasi Transaksi	0.05	Valid
	Migrasi Data antar Modul	0.05	Valid
	Pelaporan Periodik (<i>Audited</i> dan <i>Unaudited</i>)	0.05	Valid
SDMA	Pemahaman PMK Nomor 50/PMK.05/2018	0.05	Valid
	Pengetahuan sistem terkait	0.05	Valid
	Kemampuan mengoperasikan aplikasi	0.05	Valid
	Keikutsertaan Pelatihan/ Bimtek/ Workshop	0.05	Valid
	Sikap Kerja/ Etos Kerja	0.05	Valid
SPIP	Kewenangan Pelaksanaan	0.05	Valid
	Otorisasi Transaksi	0.05	Valid
	Pengawasan Inspektorat	0.05	Valid
	Rapat Evaluasi/ Reviu	0.05	Valid
	Dokumentasi/ Penatausahaan	0.05	Valid
KLKP	Pemahaman PP Nomor 60 Tahun 2008	0.05	Valid
	Penerapan 5 unsur SPIP	0.05	Valid
	Kewenangan dan otorisasi pelaksanaan SPIP	0.05	Valid
	Pengawasan/ Pemantauan	0.05	Valid
	Penatausahaan/ Dokumentasi	0.05	Valid

Sumber: Data primer diolah pada SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 2, hasil Uji Validitas menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintahan (KLKP), sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI), kompetensi sumber daya manusia aparatur (SDMA), dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mempunyai hasil r hitung lebih besar daripada r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner tersebut valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Dengan signifikansi 5% dan kriteria pengujian dikatakan reliabel jika Cronbach Alpha > 0.7. Pengujian reliabilitas setiap item pernyataan menggunakan bantuan program SPSS 26. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	N Item	Nilai Alpha Cronbach	Koefisien	Keterangan
KLKP	5	0.799	0.7	Reliabel
SAKTI	5	0.768	0.7	Reliabel
SDMA	5	0.801	0.7	Reliabel
SPIP	5	0.720	0.7	Reliabel

Sumber: Data primer diolah pada SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 3, hasil Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintahan (KLKP), sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI), kompetensi sumber daya manusia aparatur (SDMA), dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mempunyai hasil Cronbach Alpha > 0.7 , sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner tersebut reliabel atau masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

Dengan bantuan Aplikasi *SPSS-26* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4 Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	Ket.
Asymp. Sig (2-tailed)	.203	Terdistribusi Normal

Sumber: Data primer diolah pada SPSS (2023)

Tabel di atas merupakan hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov Smirnov terhadap masing-masing persamaan dengan variabel independen sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI), kompetensi sumber daya manusia aparatur (SDMA), dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Berdasarkan tabel di atas, nilai sign. yang di peroleh adalah .203. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($>5\%$) artinya semua data terdistribusi normal.

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan data yang diperoleh dari sebaran kuesioner data yang dikumpulkan secara langsung, dan diolah menggunakan aplikasi olah data SPSS26, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Adjusted R-Square, Uji F, dan Uji t

Variabel	Prediksi arah	B	Sig	Keputusan
Constant		1790.997	0.000	
SAKTI	Positif	113.704	0.001	H ₁ diterima
SDMA	Positif	180.929	0.000	H ₂ diterima
SPIP	Positif	48.604	0.018	H ₃ diterima
Uji F		33.385	0.000	
Adjusted R Square		0.741		

Sumber: Data primer diolah pada SPSS (2023)

Persamaan Regresi

Persamaan regresi linier berganda dengan tiga variabel bebas sebagai berikut:

$$KLKP = 1790.997 + 113.704 \text{ SAKTI} + 180.929 \text{ SDMA} + 48.604 \text{ SPIP}$$

Angka yang dihasilkan pada persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Konstanta (a)

Nilai konstanta sebesar 1790.997 memiliki nilai yang positif yang berarti bahwa variabel bebas yang terdiri dari sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI), kompetensi sumber daya manusia aparatur (SDMA), dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sama dengan nol, maka variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 1790.997.

2) Koefisien regresi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) (b_1)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dengan koefisien regresi sebesar 113.704 yang artinya apabila Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah mengalami kenaikan sebesar 113.704 dengan asumsi bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam kondisi konstan.

3) Koefisien regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) (c_2)

Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dengan koefisien regresi sebesar 180.929 yang artinya apabila Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) mengalami kenaikan sebesar 1

satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah mengalami kenaikan sebesar 180.929 dengan asumsi bahwa variabel Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam kondisi konstan.

4) Koefisien regresi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (d_3)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dengan koefisien regresi sebesar 48.604 yang artinya apabila Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengalami kenaikan 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah mengalami kenaikan sebesar 48.604 dengan asumsi variabel Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) dalam kondisi konstan.

Uji Koefisien Determinasi

Dari perhitungan menggunakan aplikasi *SPSS 26* pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan pada *Adjusted R-squared* sebesar 0.741 atau 74.1% yang berarti bahwa variabel independen yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bersama mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebesar 74.1% dan sisanya 25.9% dipengaruhi variabel lain diluar model.

Uji F

Berdasarkan tabel, diperoleh nilai Sig sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05 ($0.00 < 0.05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Uji t

Berdasarkan tabel dengan perhitungan data menggunakan *SPSS26*, dapat dilihat bahwa Variabel Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) diperoleh sebesar 0.001 yang berarti berarti lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0,05$), Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) memperoleh hasil sebesar 0.00 yang berarti lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0,05$), serta Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memperoleh hasil 0,018 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,018 < 1,05$) dengan demikian artinya secara parsial variabel SAKTI, SDMA, dan SPIP berpengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah (KLKP).

Pembahasan

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (H₁)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dijelaskan bahwa sistem yang semakin baik maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan *Technology Acceptance Model (TAM) theory* bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi informasi yang baik dan sesuai dengan PMK No 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI dalam akuntansi publik di sektor pemerintahan dapat meningkatkan kinerja sehingga dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menjadi cepat dan akurat. Pelaksanaan SAKTI di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana yang tertuang dalam peraturan didukung oleh pengelolaan monitoring data dan transaksi SAKTI secara elektronik. SAKTI merupakan sistem aplikasi keuangan yang memiliki andil dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. *Single Entry Point (SEP)* pada SAKTI menjelaskan bahwa aplikasi SAKTI terintegrasi dan hanya melakukan satu kali input apabila dibutuhkan pada modul yang berbeda sehingga lebih efektif. Fitur lain yang dimiliki yaitu validasi transaksi, pencatatan jurnal secara realtime, laporan periodik dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Penggunaan Aplikasi SAKTI pada pelaksanaan penyusunan laporan keuangan sangat bermanfaat dan membantu terhadap akuntansi pemerintah sehingga memudahkan dalam proses penyusunannya. Hal tersebut selain karena adanya *single entry point* yang dapat meminimalisir kesalahan input serta integrasi data antar modul, SAKTI mampu menghasilkan data secara *real time* dan dapat secara otomatis menghasilkan komponen pelaporan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan pada setiap periode pelaporan keuangan pemerintah.

Adapun proses penyusunan oleh Aplikasi SAKTI dilakukan secara elektronik dengan data yang terintegrasi dan meminimalisir adanya human error. Terpusatnya database SAKTI/multi-user oleh unit pengelolaan yaitu Kementerian Keuangan sebagai penyelenggara sistem dan Kementerian/ Lembaga selaku pengguna akan mampu memudahkan para staf PPK bekerja dimanapun berada meskipun tetap menggunakan hak ases pengguna sesuai kewenangannya termasuk dalam verifikasi transaksi, yaitu staf PPK. Staf PPK tidak serta merta bekerja, namun ia bertanggungjawab atas pekerjaannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga dapat dipertanggungjawabkan termasuk pengaruh terhadap kualitas laporannya. Kualitas laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dimana

kualitas laporan keuangan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebagai perwujudan dari akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Purwasih (2023), Sabrina (2023), Pambudi (2022) dan Animah (2020) yang menyatakan bahwa variabel Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berpengaruh positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (KLKP).

Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (H₂)

Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) yang semakin baik, maka akan semakin baik atau tinggi kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan, hal ini sejalan dengan Teori *Resource Based View* (RBV) yang beranggapan bahwa keberhasilan ditentukan oleh sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki organisasi. Semakin baik kompetensi penyusun laporan keuangannya, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kompetensi SDMA yang baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (K3) bagi pengelola keuangan sektor pemerintah, maka akan memudahkan dalam mencapai tujuan instansi yang salah satunya diukur dari kualitas laporan keuangan pemerintah pada PP No 71 Tahun 2010 tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai *Principal* sebagaimana yang disampaikan dalam *Agency Theory*. Oleh karenanya, sangat disarankan bagi suatu instansi agar memperhatikan aspek sumber daya manusia aparatur khususnya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis terkait penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDMA sehingga memberi pengaruh terhadap kinerjanya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada lingkungan Setjen DPR RI telah berupaya dalam meningkatkan kompetensi SDMA sehingga staf PPK memahami peraturan dan prosedur yang harus ia miliki baik kewenangan dan tugasnya. Kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi dalam hal ini adalah Aplikasi SAKTI menjadi kewajiban seorang staf PPK. Unit kerja Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif dan Biro Keuangan Setjen DPR RI berupaya meningkatkan kualitas kompetensi SDMA dengan melaksanakan pelatihan, bimtek dan workshop. Setelah pengetahuan dan keterampilan, sumber daya manusia yang ada juga diharapkan memiliki sikap kerja melalui disiplin, teliti, jujur dan cermat, maka dilaksanakan *capacity building* secara rutin tahunan. Hal tersebut juga merupakan upaya instansi dalam mempertahankan kualitas kompetensi SDMA yang sudah baik agar para staf PPK bekerja dengan baik sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku.

Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat, dan sikap kerja yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kompetensi dalam pencapaian kriteria staf PPK.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Purwasih (2023), Sabrina (2023), Iqbal (2022), Fernandes (2022), Pradnyandari (2022), Mursyidah (2022), Kaok (2021), Fakhri (2021), Asiah (2019), dan Lubis (2018) yang menunjukkan bahwa variabel Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) berpengaruh positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (KLKP).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (H₃)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang semakin baik berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. Pengendalian internal yang dilakukan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan SK Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1268/SEKJEN/2015 mampu memberikan keyakinan terhadap pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien serta keandalan laporan keuangan, sehingga segala tindakan sesuai dengan kepentingan organisasi dan melaksanakan tanggungjawab dengan baik sebagaimana diamanahkan oleh masyarakat sebagai *Principal* dalam teori keagenan, sehingga pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan PP No 71 Tahun 2010 tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Dalam penelitian ini, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan komponennya berupa lingkungan pengendalian yang meliputi integritas dan etika, komitmen organisasi, kepemimpinan yang kondusif serta pendelegasian kewenangan dan tanggungjawab yang tepat hingga mewujudkan SPIP yang efektif dalam hubungan kerja, penilaian resiko yang teridentifikasi serta cara pengelolaan resiko dengan baik dan tepat, komponen kegiatan pengendalian agar organisasi dapat sesuai dengan tujuan organisasi, komponen informasi dan komunikasi yang sehat dan efektif, serta komponen terakhir yaitu pemantauan berupa kegiatan rutin seperti evaluasi dan revidu, semua komponen dalam unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah sebagaimana uji dalam penelitian ini. SPIP merupakan kewajiban dan rutin dilaksanakan oleh setiap pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara internal melalui Inspektorat Instansi, dalam hal ini Inspektorat Sekretariat Jenderal DPR RI. Pimpinan Sekjen DPR RI diharapkan mampu untuk bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungannya dengan tantangan yang dihadapi yaitu penyelenggaraan yang belum diarahkan untuk mengawal tujuan organisasi, khususnya dalam pengendalian atas fraud, karena penilaian sendiri berfokus pada pemberian skor.

Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yaitu Purwasih (2023), Iqbal (2022), Fernandes (2022), Pradnyandari (2022), Mursyidah (2022), Goo (2021), Hainil (2021), Agustiawan (2021), Sulastri (2020), Asiah (2019), Mulyadi (2019), Askikarno (2019) yang berkesimpulan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (KLKP).

KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, IMPLIKASI MANAJERIAL DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel. Data diperoleh dari angket/kuesioner yang disebarakan melalui *google form* kepada Staf PPK sesuai SK Persekjen terbaru di Lingkungan Sekretariat Jenederal DPR RI. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Uji Korelasi Data Variabel Independen terhadap Variabel Dependen menggunakan Aplikasi *SPSS26*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan yaitu data ini hanya mengambil dari satu satuan kerja sehingga hasil penelitian ini tidak mengindikasikan pengaruh pada satuan kerja lain.

Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial dalam penelitian ini secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang terkait hal-hal yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di lingkungan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini bagi Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi (monev) dalam stabilisasi penggunaan Aplikasi SAKTI, Kompetensi SDMA melalui sosialisasi/ bimtek secara berkala, serta pengawasan dalam mempertahankan dan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Saran

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti: komitmen organisasi, standar akuntansi pemerintah, dan pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas sampel dengan satuan kerja lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Supriyono, R.A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press